

3. HUKUM DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran APBD untuk pencapaian Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp020.610.000,00** atau sebesar **0,0975%** dari total APBD Tahun 2018 sebesar Rp2.027.393.505.735,00-. Alokasi anggaran Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat direalisasikan sebesar **Rp1.653.756.442,00**-atau sebesar **81,66 %** sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut ini.

Tabel IV.F.3.1
Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Hukum dan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	2.020.610.000	1.653.756.442	81,84
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.610.000	194.385.344	96,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	69.622.779	92,83
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.745.000.000	1.389.748.319	79,64
B	Belanja Tidak Langsung	0	0	0
	Total Belanja	2.020.610.000	1.653.756.442	81,84

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 (diolah)

b. Program Dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung program ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang menunjang program ini meliputi kegiatan Pengadaan Komputer/Laptop, Printer, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan / operasional kegiatan bagian hukum khususnya dalam proses penyusunan raperda dan raperbup.

3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta tidak bias gender, maka dilakukan penataan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) perda, 3 (tiga) diantaranya adalah Perda APBD dan 14 Perda lainnya yang merupakan Raperda yang diagendakan dalam prolegda tahun 2018. Dari seluruh Raperda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, tidak satupun yang dibatalkan oleh pemerintah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Hal tersebut karena dalam proses penyusunannya sudah melalui konsultasi publik, baik yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam proses pembahasan raperda telah melalui beberapa mekanisme dan tahapan yang harus dilaksanakan, dimana untuk raperda APBD melalui evaluasi gubernur. Pada tahun 2018 tidak ada perda yang dibatalkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain : **Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan**, kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana penyebaran produk peraturan perundang-undang khususnya peraturan daerah, pada tahun 2018 perda yang disosialisasikan adalah Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Perda tentang Usaha pariwisata, Penyelenggaraan usaha hiburan, Kabupaten Wonosobo ramah HAM, Perda tentang pemilihan kepala desa dan perda tentang penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi Perda di 12 kecamatan/desa. Kegiatan **Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan**, kegiatan ini untuk memfasilitasi pengkoordinasian penyusunan propemperda yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan raperda pada tahun yang akan datang, pada tahun 2018 telah dapat ditetapkan 10 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda tahun 2019, kegiatan ini juga untuk melaksanakan bintek perancang perundang-undangan bagi 40 personil petugas perancang perundang-undangan.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.F.3.2

**Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-
Undangan Berdasarkan Indikator RKPD 2018**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	Target RPJMD 2021
1	Rasio realisasi Propemperda	0,44	0,32	0,44	137,5%	0	0,40
2	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	100%	0	100%
3	Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup	0	0,1	0	100%	0	0,1
4	Persentase perbup yang ditetapkan terhadap jumlah perbup amanat Perda	20%	10%	10%	100%	0	50%

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $\geq 80\%$ - 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Rasio realisasi Propemperda pada tahun 2018 mencapai 44% hal ini berarti realisasi capaian tahun 2018 lebih dari target capaian dan realisasi capaian Perda yg ditetapkan pada tahun 2018 mencapai 100% atau secara keseluruhan disetujui oleh DPRD. Persentase Realisasi Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup pada tahun 2018 adalah 0% hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2018 telah tercapai. Secara rinci peraturan daerah yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.F.3.3
Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2018

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1.	1 Tahun 2018	Perlindungan Cagar Budaya	24Januari 2018
2.	2 Tahun 2018	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	24Januari 2018
3.	3 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa	24Januari 2018
4.	4 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24Januari 2018
5.	5 Tahun 2018	Badan Permusyawaratan Desa	16Mei 2018
6.	6 Tahun 2018	Penetapan Desa	16Mei 2018
7.	7 Tahun 2018	Usaha Pariwisata	2Agustus 2018
8.	8 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2Agustus 2018
9.	9 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama	2Agustus 2018
10.	10 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	13Agustus 2018
11.	11 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah	13Agustus 2018
12.	12 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	15Agustus 2018
13.	13 Tahun 2018	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	18Oktober 2018
14.	14 Tahun 2018	Penanggulangan Tuberculosis, HIV dan AIDS	21November 2018
15.	15 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah	21November 2018
16.	16 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo	21November 2018
17.	17 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019	31Desember 2018

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2017

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Fungsi lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan, beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi yang perlu diupayakan untuk mengurai permasalahan sebagai berikut :

Tabel IV.F.3.4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada
Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Adanya Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.WSB dari Ketua Asosiasi Pengusaha Karoke Wonosobo (ASPARAW) Kepada Bupati Wonosobo dan DPRD Kabupaten Wonosobo Materi Gugatan adanya kerugian materi akibat penutupan usaha karoke. Dasar hukum penutupan karoke adalah Keputusan Bupati wonosobo Nomor 556/338/2018 tentang Penghentian Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke di Kabupaten Wonosobo yang tidak Memiliki Izin.	Untuk menghadapi gugatan ini Bupati telah menunjuk kuasa Khusus dengan substitusi dari Bupati Wonosobo kepada PltKepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : 180/1082/HK/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan surat kuasa substitusi dari Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo nomor SK-31/O.3.38/Gph.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Sedangkan DPRD menunjuk Alimin, SH sebagai kuasa Hukum
2	Adanya Gugatan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.WSB Pihak Penggugat adalah PT TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA , sedangkan Pihak Tergugat adalah : • PA dan PPK Tergugat I • PPTK Tergugat II • Kepala Disdagkop UKM tergugat III • Inspektur tergugat IV • Bupati tergugat V Materi gugatan terkait pembangunan pasar induk kabupaten wonosobo	Telah ditunjuk kuasa khusus dari tergugat kepada Plt Kepala Kejaksaan negeri Wonosobo masing-masing dengan surat nomor : 180/855/hk/2018 180/857/hk/2018 180/858/hk/2018 180/859/hk/2018 dan Surat Kuasa Substitusi dari Plt Kepala Kajaksan Negeri Wonosobo kepada Jaksa pengacara Negara dengan surat nomor : SK.21/O.3.38/Gph.2/09/2018 SK.22/O.3.38/Gph.2/09/2018 SK.19/O.3.38/Gph.2/09/2018 SK.18/O.3.38/Gph.2/09/2018